

INDONESIA

MADJALAH KEBUDAJAAN

Keputusan PERDA DJAKARTA RAYA
DAN SEMERANG TGL. 1 NOPEMBER
No. 191/1960.



DJANUARI-PEBRUARI-MARET 1960, TAHUN XI NO. 1

Atano

KONFRONTASI DENGAN PIKIRAN-PIKIRAN KEBUDAJAAN INDONESIA DEWASA INI

Digitized by Penggiat Buku

SEDJAK Kongres Kebudayaan di Magelang ditahun 1948 semakin kuatlah ketjenderungan dalam masjarakat kita untuk nemikirkan kebudayaan sebagai masalah bangsa, meskipun arah yang sedemikian itu telah kelihatan didjaman Pergerakan Nasional sebelum perang. Djika kita melihat ketjenderungan² itu maka tidaklah sjak lagi, bahwa hal itu mempunyai pertalian yang erat dengan pergolakan bangsa kita yang hendak menjusun masjarakatnja menjadi suatu masjarakat yang merdeka untuk menjapai tjita³ kebahagiaan bangsa. Djadi kita melihat sedjak sebelum perang masalah kebudayaan itu tidak sadja diperpikirkan oleh para terpeladjar yang tidak berpolitik, tetapi lebih⁴ oleh para pemimpin pergerakan, seperti Dr Sutomo, Ki Hadjar Dewantoro, dsb. maka tidaklah terlalu absurd djika disini kita menarik suatu kesimpulan, bahwa setiap perdjungan yang bersifat politik tanpa landasan kebudayaan, dengan perkataan lain, bahwa setiap revolusi politik tanpa berbarengan dengan revolusi kebudayaan, tidak akan menjapai tudjuannja. Oleh karena itu tidak terlalu sukar dipahami, bahwa gelombang dahsjat yang kini sedang membawa kita kepada suatu kebudayaan nasional tidak dapat dilepaskan dari Manifesto Politik Pemerintah dan Dekrit Presiden untuk kembali berlaku UUD-1945. Adalah senantiasa, bahwa revolusi politik itu harus didasari ataupun didampingi dengan revolusi kebudayaan. Umpamanya di Perantjis revolusi 1789 tidaklah mungkin dapat dibayangkan seandainya Reusseau dan Voltaire tidak bekerdja lebih dulu untuk memberikan landasan kepada revolusi itu. Demikian djuga revolusi Rusia ditahun 1917 tidaklah dapat dibayangkan seandainya Lenin tidak bekerdja lebih dulu untuk memberikan landasan kepada revolusi itu. Oleh sebab itu mengertilah kita sepenuhnya, bahwa disekitar tahun 1935 terdjadi pertemuan dan persimpang-siuran pikiran⁵ tentang kebudayaan. Bahwa pikiran⁶ itu tidak menentu arahnja hal itu adalah soal lain, tetapi sebagai fenomena kita lihat, bahwa keperluan akan pikiran⁷ tentang kebudayaan telah dirasakan oleh para pemimpin kita pada waktu itu sebagai keperluan untuk mempersiapkan Indonesia Merdeka, dan malahan sedjarah telah menjtatat, bahwa pikiran⁸ tentang kebudayaan itu telah dirasakan sebagai keperluan untuk mempersiapkan revolusi Indonesia. Sebagaimana kita ketahui pikiran⁹ tentang kebudayaan itu yang telah berusaha saling bertemu adalah sebagai landjutan dari Kongres Perguruan Nasional yang mempersoalkan masalah pembaharuan kebudayaan dan pelarasan atau penjesuaian dengan djaman baru, dengan tema bagaimanakah sikap kita menghadapi kebudayaan Barat ¹⁾. Melihat, bahwa idee² tentang revolusi pada waktu itu tidak diperdengarkan dan pikiran atas pandangan sedjarah yang mendalam boleh dikatakan tidak ada, maka

1) P.J. Zoetmulder, *Cultuur Oost en West*, Amsterdam, 1951, p. 5.

barangkali memang sulit untuk menjebut, bahwa Kongres Perguruan Nasional itu hendak mempersiapkan suatu revolusi. Namun sampai sedjauh itu hendaklah kita tidak terlalu tergesa-gesa untuk melemparkan sesuatu dakwaan, bahwa bangsa kita disaat itu tidak memiliki radikalisme dalam idee dan pikiran. Suatu pendekatan jang mendukung simpati kiranja lebih sejogjanja, bahwa bangsa kita, artinja inteligensia kita sebagai inti bangsa, tidak dengan sangat sadar mempersiapkan revolusi Indonesia dengan idee² kebudayaan. Akan tetapi setjara intuitif toh telah dirasakan, betapa daruratnja menghubungkan tjita² kemerdekaan bangsa dengan tjita² kebudayaan. Hanja sajang, bahwa pertemuan² antara pikiran² tentang kebudayaan itu jang merupakan bagian penting dari sedjarah perebutan kembali kemerdekaan bangsa tidak berdjalan lantjar, malahan terlampau berlarut-larut, karena mungkin disebabkan oleh perasaan intuitif jang kurang tadjam terhadap nilai²nja, sehingga banjak tertinggal oleh arus sedjarah jang dinamik. Dalam djaman revolusi dan kemerdekaan diusahakanlah lagi pertemuan antara pikiran² tentang kebudayaan itu, bukan hanja sekali dua, melainkan berkali-kali. Kita dapat mentjatat, bahwa ditahun 1948, mereka berkumpul di Magelang, ditahun 1951 di Bandung, ditahun 1954 di Solo dan ditahun 1957 di Den Pasar. Djika dalam pertemuan² itu masih djuga tidak disadari eratnja pertalian antara nilai² revolusi dan nilai² kebudayaan, maka sedjarah akan mengulang hasil jang sama. Dan dalam keadaan jang sangat ber-larut² itu, mungkin kita akan membenarkan apa jang dimaksudkan oleh Herbert Read dengan "To Hell with Culture" ²).

FENOMEN KEBUDAJAAN

Oleh karena djustru perkataan revolusi kebudayaan itu teramat penting, maka pendekatan kepada fenomena kebudayaan itu sebagai langkah pertama adalah jang paling duluan harus dilakukan. Apa jang tidak dapat disangkal dari suatu kenyataan jang ditundjukkan oleh fenomena kebudayaan itu ialah, bahwa kebudayaan itu adalah peristiwa jang ditjptakan dan dialami oleh manusia. Setjara fenomenologik maka kebudayaan itu tidaklah lain daripada dunia jang telah disusun, jang telah dikonstitusikan. Dan hanjalah manusia jang sanggup mengkonstitusikan dunia itu. Oleh karena itu tjiri² kebudayaan adalah tersusunja segala sesuatu. Sesuatu benda atau barang tidak mungkin mengambil bagian dalam kebudayaan, walaupun hanja setjara objektif sadja, apabila tidak berhubungan dengan sesuatu benda atau barang lain. Misalnja suatu barang, sebutlah barang itu kapas, apabila kapas itu tidak berhubungan dengan barang lainja, maka tidaklah mungkin kapas itu disebut mengambil bagian didalam kebudayaan. Bila kapas itu telah tersusun, teratur, mendjadi suatu kertas umpamanja, maka kapas itu telah mengambil bagian dalam kebudayaan. Tetapi haruslah didjelaskan setjara teknik, bahwa pengertian „berhubungan dengan barang lain“ hanjalah dalam arti konstitusional, sehingga arti „berhubungan dengan barang lain“ disini adalah „ber-sama² barang lain merupakan suatu susunan jang teratur, susunan mana dikerdjakan oleh manusia menurut makna dan keperluannja“. Dengan demikian kenyataan, bahwa kapas berhubungan dengan kulitnja, dengan tangkainja, dsb. bukanlah suatu hubungan konstitusional, bukanlah suatu hubungan jang disusun, melainkan suatu hubungan alamijah, organik, dsb. Djadi lebih tepatlah bila dikatakan, bahwa hubungan itu tersusun, dan hubungan jang tersusun itu timbul dari kondisi hidup manusia. Sebagaimana barang itu berhubungan dengan barang lain sebagai suatu hubungan jang tersusun, dengan perkataan lain, barang itu tidak dapat lepas dari barang lain, demikian pula halnja

²) Herbert Read, *The Politics of the Unpolitical*, London, 1946, p.p. 47-73.

manusia yang mengerdjakan susunan itu, ia menjusun suatu hubungan konstitusional menurut makna dan keperluannya, sehingga mau tak mau ia harus berhubungan dengan orang-lain. Djika ia menjusun barang² itu mendjadi suatu susunan yang teratur, umpamanya ia menjusun dari sebuah kertas kosong mendjadi sebuah kertas yang mengandung djuga oleh orang-lain. Dalam hal demikian disebutlah, bahwa susunannya itu, jaitu sebuah lukisan yang terdiri dari sebuah kertas, tjoret²an tjat, dsb. mengandung makna, artinja si penjusun ingin menjampaikan sesuatu kepada orang-lain tentang kenyataan yang telah dialaminya, umpamanya ia melukis seorang wanita, si pelukis ingin memberitahukan kepada orang-lain tentang perhatiannya kepada seorang wanita yang pernah dilihatnja. Akan tetapi djika seorang meng-garis²kan tjat pada sebuah kertas tanpa maksud sesuatu apa, tjoret²annya itu djadilah, akan tetapi tidak bermakna, atau ia dapat men-tjoret²kan tjat²nja dengan mengandung sesuatu makna, umpamanya ia ingin menundjukkan perhatiannya kepada sebuah gunung yang terbentang djauh dihadapannya, dilukisnja gunung itu, tetapi kemudian sebelum ia selesai melukis ia tidak tertarik lagi, dimoreng-morengnja lukisannya itu, sehingga n.akna-makna bertentangan dalam diri si pelukis itu, maka dalam hal, bahwa seseorang berbuat sesuatu tanpa makna, atau seseorang berbuat sesuatu dengan makna³ yang saling bertentangan, disebutlah, bahwa orang itu melakukan sesuatu yang absurd. Sesuatu yang absurd setjara subjektif tidak dapat mengambil bagian dalam kebudayaan, akan tetapi bisa setjara objektif, umpamanya seseorang yang menjampaikan kepada orang lain, bahwa orang yang pertama itu sedang diliputi oleh perasaan absurd.

Dari beheran ini kesimpulannya ialah, bahwa segala sesuatu itu dapat mengambil bagian setjara objektif didalam kebudayaan, didalam peristiwa kemanusiaan apabila segala sesuatu itu tidak bersifat as sich, melainkan bersifat für sich. Dalam berhadapan stjara für sich dengan manusia, maka alam atau bagian alam disusun mendjadi suatu hubungan yang tersusun untuk mengambil bagian dalam hidup manusia yang penuh mengandung makna, seperti kita lihat seorang petani yang hendak mentjangkul sawahnja, ia menjusun tjangkulnja dari sebatang kayu dengan sebuah badja yang tadjam, sehingga dengan lebih mudah ia dapat mentjangkul sawahnja. Lambat-lauⁿ bila manusia sesudah lebih madju dalam menghadapi alam objektifnja maka ia menemukan akal untuk meluku sawahnja itu setjara lebih praktik, dengan seekor atau dua ekor kerbau yang menarik lukunja, dan kemudian bila kemandjuaan teknik sudah bertambah, maka manusia menemukan traktor untuk keperluannya setjara lebih modern. Dari sedjarah perkembangan teknik manusia itu, maka senantiasalah manusia ingin membebaskan diri dari alam, djika dahulu untuk mentjangkul sawahnja ia mempergunakan tjangkul yang sangat sederhana, lalu semakin bertambah praktik sampai kemudian menemukan traktor, maka manusia sebagai daja alam atau djasmaniah makin diperingankan bebannya, dengan perkataan lain, manusia membebaskan diri dari alam dan ini disebut, bahwa manusia berusaha melakukan transendensi terhadap alam, jaitu menerdjang keluar batas alam untuk menemukan hakikat dirinja sebagai makhluk kebudayaan. Akan tetapi hal ini tak berarti bahwa manusia berusaha mengingkari dirinja sebagai bagian dari alam, meskipun tidak seluruhnja merupakan bagian alam itu, tidak, manusia tetap merealisasikan dirinja, bahwa sebagian dari dirinja adalah bagian alam, akan tetapi yang hendak ditjapai oleh manusia ialah seperti dikatakan oleh Bergson manusia ingin meratakan djalan hidup yang dirintang²i oleh materi.

TJITA-TJITA KEBUDAJAAN DALAM PERBURUHAN

Sebagaimana kita ketahui kebudayaan itu adalah suatu proses pengaturan atau "ordening" dari alam oleh manusia. Perdjuaan melawan alam tidaklah mengandung

implikasi, bahwa manusia hendak membinasakan alam, melainkan hanjalah hendak memberikan isi yang berupa makna dalam alam itu. Ini berarti, bahwa manusia mengatur, menjusun, menata alam. Umpamanya manusia merombak suatu hutan menjadi kota, sebagai dalam jaman dahulu kita melihat berdirinya kota Majapahit atau Jogjakarta. Hutan² itu kita rombak, lalu kita dirikan rumah demi rumah, kita bentangkan jalan, dsb. Kita telah menjusun alam menjadi lain, karena dengan penjusunan itu kita mengisikan makna² insani kita, kita ingin mendirikan suatu negara. Demikianlah umpamanya kita ingin melakukan pembangunan² raksasa, kita ingin membentangkan jembatan², terusan², dsb. atau kita ingin mendirikan pabrik², mengadakan industrialisasi, dsb. Hal itu semuanya memperlihatkan bahwa kita menundukkan makna insani kita dalam suatu proses alam yang mengandung perubahan².

Sudahlah semestinya apabila kesemuanya itu tidak dapat dilakukan oleh seorang diri, melainkan kesemuanya dilakukan oleh suatu kesatuan sosial. Kita tidak dapat melakukan pembangunan dengan seorang diri, kita tidak dapat mengadakan produksi dengan seorang diri, melainkan kesemuanya itu kita lakukan ber-sama². Dari sinilah lahirnya masalah perburuhan dan sosial, suatu masalah yang senantiasa menggoda kita, sedjak dahulu hingga sekarang. Perjuangan disekitar masalah perburuhan dan sosial ini pada hakikatnya adalah perjuangan disekitar kebudayaan sebagai suatu proses sosial. Dalam proses sosial inilah diperjuangkan, bahwa manusia harus tetap merupakan pengolah atau pengatur alam dan tidak sebaliknya manusia jangan menjadikan objek kebudayaan, paling sedikit ia harus merupakan subjeknya, yang mengatur dan yang hendak menguasai alam. Dalam jaman dahulu, disaat feodalisme merupakan sistem sosial yang dianut oleh manusia, maka buruh atau pekerdja tidaklah jarang merupakan sekedar alat untuk mengatur alam yang akan mendukung makna si tuan tanah, si buruh atau si pekerdja itu tidak mempunyai makna sendiri, dan dalam keadaan yang demikian itulah disebut, bahwa situasi sosial yang demikian itu menjatakan suatu perbudakan. Djika dalam pertengahan yang kedua dari abad ke-18 di Perancis meletus suatu revolusi, hal itu disebabkan oleh karena manusia hendak kembali kepada dirinya sebagai subjek dan tidak sebagai objek kebudayaan. Dalam kebudayaan djika kita berbitjara tentang objek maka yang dimaksud ialah alat sebagaimana kita mempergunakan sapi atau kerbau sebagai alat, sebagai objek kebudayaan. Demikianlah umpamanya situasi sosial yang hendak menimbulkan suatu absurditas (makna yang tidak keruan) dikalangan subjek² kebudayaan, hingga merupakan objek² kebudayaan itu pernah dilukiskan oleh Gilbert Gadoffre tatkala menganalisis krisis demokrasi sebagai gambaran dari krisis abad ke-20 ini ³⁾. Dalam analisisnya itu dikemukakannya, bahwa kegagalan sistem sosial yang ditjiptakan oleh liberalisme antara lain disebabkan oleh karena tidak dapat dipertanggungjawabkannya pemakaian kapital, sehingga jurang yang makin lebar dan mendalam terus-menerus terjadi antara buruh dan majikan, dengan perkataan lain, tidak ada tanggungjawab yang membawa keadilan kaum buruh. Disamping itu sistem sosial yang ditjiptakan oleh liberalisme telah gagal karena tidak dapat dipertanggungjawabkan sistem persaingan, karena sistem persaingan yang dimaksudkan untuk menjegah monopoli, malahan menuju kearah monopoli dan membawa suatu penyakit sosial, jaitu mentjiptakan industri² perang, sebagaimana ternjata dalam sedjarah umat-manusia dalam abad ke-20 ini yang mengenal dua perang dunia. Djika Gadoffre sampai kepada suatu kesimpulan, bahwa faktor² inilah yang menjeret manusia kedalam suatu krisis demokrasi, sehingga timbullah ekstremisme² dari demokrasi dalam pendjel-

³⁾ G. Gadoffre, *Vers le style du XXe siècle*, Paris, 1945, pp. 29-30.

maannya yang berupa totalitarisme kiri disatu pihak dan totalitarisme kanan dilain pihak hal itu mudahlah dipahami. Dalam mengikuti proses ditinggalkannya demokrasi dan diperolehnya bentuk³ yang sangat ekstrem dari demokrasi ini maka kita akan senantiasa teringat kepada Herbert Read yang menyatakan, bahwa kelemahan demokrasi terletak dalam kenyataan, bahwa demokrasi itu memiliki suatu "physical impossibility", sehingga meskipun kita dapat memperoleh suatu pemerintahan dari rakyat, malahan suatu pemerintahan untuk rakyat, akan tetapi menurut Herbert Read kita tidak mungkin memiliki suatu pemerintahan oleh rakyat. Hal ini telah terbukti dalam sedjarah yang dijelaskan dalam mythes tentang Prometheus, suatu mythes yang menggambarkan pertegangan antara napsu meninggalkan kemanusiaan dan kembali kepada kemanusiaan. Kronos yang karena tidak memberikan kemungkinan kepada kemajuan dunia digulingkan oleh Zeus dengan bantuan Prometheus, akan tetapi setelah Zeus menggantikan Kronos iapun mempunyai kebidjaksanaan yang tidak seberapa bedanya, ia telah meninggalkan kemanusiaan, dan sebagai reaksinya Prometheus menantang kebidjaksanaan ini, ia ingin kembali kepada kemanusiaan. Prometheus adalah suatu mythes yang dalam abad² yang terakhir ini, terutama dalam abad ke-20 merupakan tema dari kesusasteraan Barat, pemberontakan manusia melawan anasir anti-manusia. Lebih hebat dan seram lagi orang Barat menggambarkan pertegangan ini dalam mythes tentang Oidipous, dengan menggambarkan, bahwa Oidipous, anak Radja Thebe yang dibuang oleh orang-tuanya sendiri, karena dewa² meramalkan, bahwa anak ini kelak membunuh ajahnya sendiri. Oidipous kemudian setelah membunuh ajahnya sendiri tanpa disadarinya, bahwa kurbannya itu adalah ajahnya sendiri, lalu membunuh seekor sphinx yang selama itu sangat mengerikan rakyat Thebe dan setelah itu Oidipous menjadi radja. Tetapi keradjaannya menjadi katjau-balau, bumi menjadi tandus, hewan² pada mati, penjakit² makin meradjalela, dsb. dan dewa² meramalkan, bahwa segala malapetaka itu akan lenjap, apabila pembunuh ajah Oidipous diketemukan dan dibuang atau dibunuh. Disini kita melihat, bahwa Oidipous yang diangkat menjadi radja, karena sebagai pahlawan ia telah dapat membunuh seekor sphinx yang merupakan antjaman maut bagi rakyat, tetapi sebaliknya dengan naiknya ketachta keradjaan ia merupakan sumber dari malapetaka rakyatnya. Hal ini menunjukkan suatu ambivalensi manusia, disatu pihak ia seorang pahlawan, dilain pihak ia seorang pengkhianat. Tidaklah terlalu djanggal karenanya apabila orang memperdengarkan suatu konflik antara manusia disatu pihak dan kemanusiaan dilain pihak. Apabila kemanusiaan tidak berhasil menguasai manusia, malahan sebaliknya kemanusiaan dikuasai oleh manusia, maka akan timbullah suatu fenomena, bahwa manusia akan meninggalkan demokrasi, karena demokrasi merupakan pernyataan dari inti yang terdalam dari kemanusiaan itu. Apabila hal itu terdjadi, maka yang kita lihat kemudian ialah, bahwa manusia dengan tidak disadarinya mendesakkan dirinya kedalam suatu ekstremisme.

DEMOKRASI SEBAGAI MASALAH KEBUDAJAAN

Teranglah disini, bahwa persoalan yang sesungguhnya tidaklah lain daripada persoalan kebudayaan. Jika dalam suatu masyarakat dipergunakan suatu sistem sosial yang konsekwensinya mentjiptakan suatu keadaan sosial, dimana banjak manusia hidup sebagai objek² kebudayaan, maka sistem sosial tersebut tidaklah mungkin mewakili suatu demokrasi. Apabila suatu masyarakat menghendaki dirinya terlalu demokratik, maka masyarakat tersebut sebagaimana kita peladjar dalam sedjarah pada hakikatnya bukanlah suatu demokrasi lagi. Perang² dunia dalam abad ke-20 ini petjah oleh karena masyarakat Barat menghendaki masyarakat yang terlalu demokratik. Demokrasi bukanlah suatu ekstremisme dan oleh karena itu tepat sekali apabila Herbert Read berkata, bahwa

tidak benarliah adanja alternatif se-akan² kita hanja menghadapi dua djalan pada suatu "driesprong", djalan jang pertama demokrasi, djalan jang kedua bukan demokrasi, umpamanja Fasisme ⁴⁾. Suatu demokrasi liberal dapat merupakan suatu contradictie in terminis, jaitu apabila kaum liberal jang hendak mentjiptakan demokrasi itu menghendaki suatu masjarakat jang terlalu demokratik. Belumlah djelas kenjataan² jang diadjar kan oleh sedjarah di Perantjis sebagai akibat dari revolusi demografik, revolusi perpindahan penduduk dari desa² ke-kota² industri jang mengakibatkan timbulnja keadaan proletariaat, kaum buruh jang bekerdja se-hari²an sekedar untuk memberi makan anak isterinja, tetapi mereka kaum buruh itu tidak berhasil dalam usahanja sebagai subjek² kebudajaan menghadapi alam-semesta jang lengkapnja ini, karena mereka sama sekali tidak mempunjai kegembiraan bekerdja, hanja setjara formal sadja mereka itu memiliki kebebasan, tetapi dalam materialnja mereka itu kehilangan kebebasan. Dan adalah ini jang merupakan tema sedjak djaman dahulu hingga sekarang jaitu masalah kebebasan dan ketidakbebasan dalam hubungan sosial. Adanja persaingan atau rivalitas kelas, dahulu antara kelas feodal dan kelas tengahan, sekarang antara kelas tengahan dan kelas buruh, dst. menundjukkan, bahwa manusia sebagai buruh bukan sekedar untuk mentjari sesuap nasi sadja, tetapi lebih daripada itu untuk menunaikan kewadajibanja sebagai manusia, jaitu untuk bertindak terhadap alam disekelilingnja tidak sebagai objek melainkan sebagai subjek kebudajaan. Perdjjuangan itu, jaitu perdjjuangan untuk merebut diri kita kembali sebagai subjek kebudajaan, dengan sengitnja masih berlangsung terus, karena persoalan jang fundamental bagi kaum buruh bukanlah hanja persoalan ekonomi, tetapi lebih dalam daripada itu adalah persoalan kebudajaan. Djika kaum buruh dalam perdjjuangannja se-hari² tidak dapat memahami persoalan jang fundamental ini, maka dibawah pimpinan jang kurang menjasai wawasan kebudajaan mereka akan terbentur kepak pada ilusi² jang sangat pahit. Dalam keadaan sebagai negara kita umpamanja memang se-akan² belum terasa kesitu persoalan kaum buruh kita, karena pada umumnya kita masih berpendapat, bahwa aspirasi kaum buruh hanjalah kesedjahteraan perut dan se-akan² tidak ada persoalan lain. Seorang buruh jang pendapatannja setiap bulannja tidak dapat memenuhi keperluan ekonomi keluarganja se-akan² hanja mempunjai keperluan ekonomi keluarganja itu sebagai tudjuannja jang terachir. Pandangan jang sedemikian tidak dapat dibenarkan oleh mereka jang mengetahui hakikat kebudajaan, sebagaimana „perburuhan“ seekor sapi atau kerbau jang diharuskan meluku sawah, melainkan djustru hendak mendjundjung manusia kemartabatnja jang semakin lebih tinggi, jaitu sebagai manusia, sebagai subjek kebudajaan, jang mengatur dan menguasai alam-semesta ini. Djika kita tidak sampai kepada wawasan ini, maka kita akan terbentur kepada keadaan sosial jang lebih menjedihkan daripada keadaan sosial dalam djaman liberal. Djika seekor sapi atau kerbau meluku sawah dan atau kerbau itu mendapat perumahan, makan dll. setjukupnja, malahan lebih daripada tjukup, tetapi sapi atau kerbau itu tidak mungkin merealisasikan dirinja sebagai subjek² kebudajaan. Oleh karena itu masjarakat demokrasi harus mendjaga dirinja djangan sampai ke-demokratik²an, karena dapat melemparkan dirinja dalam suatu ekstremisme jang sekalipun sebagai reaksi terhadap ekstremisme lain daripada demokrasi.

Disini tidak perlu kiranja diterangkan lagi, bahwa demokrasi merupakan inti daripada kebudajaan. Bagaimana pelaksanaan ini telah ditundjukkan oleh sedjarah perburuhan jang persoalannja bersentralkan pada psyche atau djiwa si buruh atau pekerdja, suatu masalah tentang kebebasan dan pembebasan, jang hingga kini masih tetap aktual. Perburuhan itu jang telah mempunjai sedjarahnja puluhan abad ternjata merupakan

⁴⁾ Herbert Read, *The politics of the unpolitical*, London, 1946, p. 4.

KEBUDAJAAN SEBAGAI TOTALITAS

Ketika dalam pertengahan tahun² tigapuluhan di Djakarta berlibatan polemik kebudayaan timbullah kesimpulan² yang merumuskan se-akan² kebudayaan Barat itu mempunyai sifat yang bertentangan dengan sifat kebudayaan Timur, yaitu dengan menjatakan bahwa kebudayaan Barat itu dinamik sifatnja, sedang kebudayaan Timur itu statik sifatnja. Dalam polemik itu dengan struktur berpikir yang sama diusahakannya untuk mendamaikan kedua kebudayaan itu dalam sintesis. Djika kita menghubungkan pendapat² yang kelihatannya per-beda² itu tentang kebudayaan dengan kenyataan yang ada, baik di-negeri² Barat sendiri, maupun di-negeri kita, akan tampaknya, bahwa persoalan-nja orang tidak melihat kenyataan itu sebagai evidensi yang langsung. Pada hakikatnja tidak mungkinlah ada sesuatu kebudayaan yang statik, karena setiap kebudayaan senantiasa dinamik, mengingat, bahwa kebudayaan merupakan suatu proses dalam sedjarah. Oleh karena itu kebudayaan itu senantiasa mengandung tendensi untuk melenjapkan segala yang asing, dengan perkataan lain, kebudayaan itu merupakan suatu totalitas, artinja kebudayaan itu menyusun suatu dunia insani, dalam mana tidak lagi terdapat pertentangan. Adalah djalan sedjarah yang senantiasa berusaha se-kuat²nja untuk menghilangkan atau menyelesaikan setiap pertentangan, akan tetapi segera pertentangan itu bisa diselesaikan, maka menjusul pertentangan berikutnya. Inilah yang merupakan inti dari dialektik sedjarah itu, dan djustru karena pertentangan sebagai tantangan diselesaikan dengan penjelesaian pertentangan itu sebagai djawabannya, maka djawabannya itu akan segera disambut oleh suatu kekuatan baru yang menimbulkan pertentangan baru dan demikianlah memang hakikat dari sedjarah itu yang senantiasa mempunyai tendensi total, meluas, bagaikan ombak samudera yang memukul pantai; djika sedjengkal tanah telah dipetjahkan, maka ombak itu akan segera datang lagi untuk memukul djengkal tanah berikutnya. Itulah ibarat dari perdjjuangan manusia dalam membentangkan sedjarahnja dalam rupa kebudajaanja sebagai proses yang total. Padamulnja manusia yang tertjampak di-tengah² alam sekitarnya merasa dirinya menghadapi barang² yang asing, karena bellum merupakan totalitasnja, tetapi segera ia berhasil mengatur alam sekitarnya itu ia mendjadikan barang² yang asing mendjadi tidak asing lagi, maka disebutlah, bahwa manusia berusaha melenjapkan segala yang asing. Perasaan asing kita pada suatu tempat dan ketika ditandai oleh objek kita yang belum mendjalankan fungsinya sebagai penghubung sosial, dengan perkataan lain, diri kita merasa asing karena kita tidak bersatu dengan orang-lain. Dalam kondisi yang demikian itu kita adalah asing terhadap orang-lain itu, sebaliknya kita djuga bisa mengatakan, bahwa kita adalah asing bagi orang lain itu. Umpamanya pada suatu hari kita menjaksikan suatu sandiwara yang kotjak, disamping kita ada dua orang-lain yang kita baru pertama kali itu melihat mereka. Pada suatu adegan yang sangat kotjak pada saat itu kita tertawa ter-pingkal², akan tetapi kita melihat djuga, bahwa dua orang-lain yang belum kita kenal itu djuga tertawa ter-pingkal² seperti kita. Andaikata kita mengenali mereka itu kita, sementara kita tertawa ter-pingkal² itu, dapat menj-tjablek² bahu mereka sebagaimana kalau kita melakukan suatu kelakar atau senda-gurau, akan tetapi kita tidak dapat mendjalankannya yang demikian itu, karena kita belum mengenal mereka. Kita ingin memberitahukan kepada mereka, bahwa pertundjukan itu sangat kotjak dan mungkin mereka itu ingin pula memberitahukan kepada kita hal yang sama. Demikianlah perasaan asing itu mengungkung diri kita. Dan pada saat kita tidak bisa lagi menguasai diri kita itu, maka meskipun kita tidak mengenal mereka itu kita akan ber-bitjara kepada mereka. Dalam hal yang sama, kita dapat menjteritakan, bahwa pada

saat seorang pemuda tertarik hatinya oleh seorang gadis yang baru pertama kali itu dilihatnya, maka pada diri pemuda itu timbullah suatu perasaan asing. Ia ingin membebaskan perasaan asing yang mengungkung dirinya itu, karena itu ia terus langsung saja berbitjara dengan gadis itu. Djika ia tidak berani berbuat demikian, maka ia akan meminta bantuan pihak ketiga untuk memperkenalkannya. Bukankah tepat apa yang dikatakan oleh Walt Whitman :

*Stranger, if you passing meet me and desire to speak to me,
why should you not speak to me?
And why should I not speak to you? ⁵⁾*

Maka bukan tidak berdasarkan kenyataan, apabila Marcel berkata, bahwa hakikat saja terdapat didalam engkau ⁶⁾, karena seorang engkau adalah seorang ia alias seorang asing yang telah dikenal, seorang asing yang telah diperangi keasingannya dan dengan seorang saja bersama² telah merupakan suatu totalitas. Lihatlah umpamanya seorang asing yang baru kemarin tiba di Djakarta, yang ketika itu sedang mengendarai mobil untuk menjari kenalnya di Kebjoran. Tetapi ia rupanya tersesat, karena ia sampai dikota dan karena ia merasa, bahwa ia tersesat itu, maka ia menghentikan mobilnya dan sambil menengok dari jendela mobilnya itu ia bertanya kepada seorang yang kebetulan sedang berdiri dipinggir jalan, orang itu belum pernah dikenalnya, tetapi orang asing itu bertanya: "Excuse me, do you speak English?" suatu kalimat pertama untuk membuka suatu pertemuan dengan orang-lain. Andaikata tidak perlu, umpamanya orang asing itu telah mengetahui sendiri jalan yang menuju ke Kebjoran, maka ia tidak akan bertanya kepada orang-lain yang belum dikenalnya itu. Djelaslah, bahwa pertemuan itu senantiasa disebabkan oleh karena keperluan: hanjalah kalau perlu orang itu berbitjara dan justru dalam keperluan inilah letaknya makna insani yang merupakan hakikat dari segala kebudayaan itu, berapa djugapun ketjilnya makna itu.

KEBUDAJAAN SEBAGAI DIALOG

Dalam hal yang demikian inilah kita memerlukan suatu bahasa dan adalah bahasa itu merupakan fungsi sosial pula, karena itu merupakan aspek kebudayaan yang penting sekali. Sebagaimana setiap kebudayaan itu akan bermula dan berakhir dengan manusia, maka oleh pentingnya aspek kebudayaan dalam rupa bahasa ini seringkali penggunaan bahasa yang salah dapat menimbulkan bentjana. Dan ini adalah tragik dari manusia, bahwa beberapa perkataan dari sesuatu bahasa tidak dapat diterjemahkan kedalam bahasa lain. Umpamanya saja dalam tahun³ tigapuluhan orang Djerman menterjemahkan perkataan Inggris "civil" dengan „Bürger“, sehingga „civil society“ disamakan oleh orang Djerman dengan masyarakat burdjuis, sedang perbedaan antara kedua istilah itu djelas, jaitu dalam "civil Society" setiap anggota masyarakat menjalankan politik dengan aktif, dengan perkataan lain, setiap anggota masyarakat mengambil bagian dalam kehidupan politik setjara bertanggung djawab, sedang dalam masyarakat berdjuaasi atau "bürgerliche Gesellschaft" tidak setiap anggota masyarakat menjalankan politik dengan aktif, dengan perkataan lain, tidak setiap anggota masyarakat mengambil bagian dalam kehidupan politik setjara bertanggung djawab, me-

⁵⁾ Orang asing, bila engkau bertemu dengan aku ditengah jalan dan ingin berbitjara dengan aku, mengapa engkau tidak akan berbitjara dengan aku?
Dan mengapa aku tidak akan berbitjara dengan engkau?

⁶⁾ Lihat C.A. van Peursen, Korte Inleiding in de Existentiephilosophien, Amsterdam, 1948, p. 34.

lainkan kehidupan itu merupakan *privilege* golongan tertentu yang oleh Herbert Road disebut golongan politik dengan ambisi perseorangan ⁷⁾).

Dalam hal bahasa itu berbeda tidak sadja dilihat dari sudut kebangsaannya, melainkan djuga dari sudut makna atau artinja, maka perbedaan itu yang menimbulkan suatu situasi asing akan dapat dipetjahkan dengan djalan melakukan suatu dialog. Lagi pula tidak hanja antara bahasa Inggris dan bahasa Djerman terdapat perbedaan itu, tetapi djuga antara bahasa Inggris dan bahasa Inggris sendiri, antara bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia sendiri, dsb. Dalam tahun 1952 tatkala seorang pengarang Perantjis, François Mauriac, dinjatakan oleh Akademi Stockholm sebagai Pemenang Hadiah Nobel untuk sastra, maka terjadilah perselisihan pikiran antara dua orang pengarang Indonesia yang menerima kabar tentang keputusan Akademi Stockholm itu. Pengarang yang seorang dengan heranja mengatakan kepada pengarang yang lain, tentang kedjadian tersebut, jaitu kedjadian keputusan tentang pemberian Hadiah Nobel itu, karena menurut pengarang itu François Mauriac adalah pengarang kelas dua. Mendengar pendapat rekannya ini pengarang yang lain, yang diadjaknja berbitjara itu djustru merasa heran, karena menurut pendapatnja François Mauriac adalah pengarang yang hebat. Perselisihan paham antara kedua pengarang yang sama² mempergunakan bahasa Indonesia itu menimbulkan suatu perasaan yang saling mengasingkan. Setelah itu mereka melakukan suatu subdistinski dalam dialog dan ternyata, bahwa pengarang yang berpendapat, bahwa François Mauriac adalah pengarang kelas dua, sebenarnya belum pernah membatja sendiri buku³ Mauriac sebahupun djuga, melainkan ia mengatakan begitu, karena membatja sebuah tulisan yang nentjela keputusan tentang Hadiah Nobel itu. Dalam hal yang serupa kita dapat menjaksikan pertemuan dua orang pengundjung konser di Gedung Kesenian pada saat istirahat. Kedua orang itu berselisih paham tentang permainan yang dilakukan seorang pianis, karena menurut orang yang seorang permainan itu djelek. Tetapi tatkala orang diadjaknja berbitjara itu menanjakan, dimanakah letaknja kedjelekan itu, maka orang yang berpendapat djelek tadi tidak dapat menundjukkannja, dan kemudian ternyata, bahwa orang itu sebenarnya tidak menguasai musik, ia hanja pura² sadja mengetahuinja. Demikianlah dengan mengemukakan subdistinski dalam dialog sematjam itu perselisihan paham atau perselisihan bahasa itu dapat dihindarkan, dengan perkataan lain, dialog mengikis sedikit demi sedikit anasir asing dari dunia manusia.

Dalam mengadakan kearah kearah terhadap fenomena bahasa ini kiranja pantaslah apabila kita teringat pada apa yang pernah dinjatakan Louis van Haeht, bahwa pada hakikatnja bahasa adalah suatu pemberontakan terhadap segala sesuatu yang dipisahkan dari diri kita dan pula suatu pemberontakan terhadap kehadiran segala sesuatu yang asing ⁸⁾. Pendeknja sebagai fenomena, maka bahasa senantiasa merupakan pemberontakan terhadap segala kesubjektivan, dengan perkataan lain, bahasa senantiasa mengarah kepada keobjektivan. Dan sebagai aspek kebudayaan, maka bahasa itu penting sekali untuk mengambil bagian dalam realisasi bersama terhadap nilai² kebudayaan.

MEMAHAMI ARTI KEBUDAJAAN NASIONAL

Dalam simposion kebudayaan yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia di Djakarta baru² ini Dr Hurustiati Subandrio dalam referatnja tentang kebudayaan nasional menjatakan, bahwa kebudayaan² daerah berkembang kearah kebudayaan nasional. Ini ditentang oleh salah seorang pendebat yang menjata-

⁷⁾ Herbert Read, *The Politics of the Unpolitical*, London, 1946, p. 1.

⁸⁾ Louis van Haeht, *Taalphilosophische Beschouwingen*, Leuven, 1947, p. 53.

kan, bahwa kebudayaan² daerah itu tidak dapat dilebur kedalam kebudayaan nasional. Ditundukkannya, bahwa tidaklah ada sesuatu seni yang bertjorak nasional, umpamanya pada suatu hari kita melihat sesuatu lukisan dan sengadja nama dan kebangsaan pelukisnya tidak diberitahukan kepada kita, maka sukarlah kita menebak, lukisan apakah itu, lukisan Djepang, lukisan Tionghoa, ataukah lukisan Indonesia. Djika pandangan atau pendirian ini tidak dimaksudkan untuk mengadakan apologi terhadap kebudayaan² daerah, melainkan terhadap kebudayaan yang melewati batas kebangsaan, maka hal itu dapatlah dipahami sebagai suatu pendirian yang wajar, suatu pendirian yang melihat kemungkinannya manusia sebagai kenyataan. Dalam hal dua pendirian itu bertentangan, yaitu yang pertama mengemukakan suatu konsep nasional tentang kebudayaan, sedang yang lain mengemukakan konsep internasional tentang kebudayaan, fenomena² itu haruslah kita dekati sebagai fenomena². Sesungguhnya kita tidak akan mungkin mengerti kepada kedua konsep yang bertentangan itu apabila kita mempergunakan bahasa yang asing untuk mendekatinya sebagai fenomena.

Djika kita boleh menafsirkan setjara fenomenologik terhadap fenomena konsep nasional tentang kebudayaan, maka terlebih dahulu kita harus mengerti fenomena nasionalisme kita sebagai fenomena sedjarah. Nasionalisme kita sebagai yang dirumuskan oleh pemimpin² kita yang dalam permulaan abad ini bergerak dalam dunia pendjadjahan adalah suatu antitesis terhadap suatu burdjuasi asing yang lazimnya disebut dengan imperialisme modern. Oleh karena imperialisme modern ini mentjiptakan suatu keadaan proletariat di Indonesia, maka kesadaran, bahwa tanpa bangsa Indonesia, maka imperialisme modern itu tidak mungkin mentjapai tujuannya, mentjiptakan suatu pengertian nasional, yang sifatnya berlainan dengan perdjjuangan kemerdekaan menentang pendjadjahan sebelum abad ke-20. Kesadaran ini adalah kesadaran nasional yang dinjatakan dalam utjapan² pemimpin² kita supaya kita sebagai rakyat yang ditindas oleh imperialisme modern itu bergerak menghimpun suatu persatuan nasional. Oleh karena itu sifat dari kesadaran nasional ini tidak se-mata² oleh kulit kita, oleh ras kita, dsb. melainkan didalamnya terkandung kesadaran sosial dan kebudayaan. Meskipun demikian, kesadaran nasional kita itu bukanlah suatu kesadaran kelas, karena kesadaran nasional itu adalah suatu kesadaran kerakjatan yang timbul oleh pendjadjahan bangsa asing. Berlainan dengan itu adalah kesadaran kelas yang tidak ditudjukan terhadap bangsa asing, melainkan terhadap bangsa sendiri, yaitu djikalau perdjjuangan sosial atas kesadaran kelas itu masih dalam taraf permulaan, yaitu taraf perdjjuangan nasional. Kesadaran kelas ini bisa timbul setelah perdjjuangan politik atas dasar kesadaran nasional selesai dan apabila perdjjuangan politik itu tidak mengubah kondisi sosial dari masyarakat kebangsaan. Demikianlah dua pendirian ini, yaitu yang pertama berdasarkan kesadaran nasional dan yang terakhir berdasarkan kesadaran kelas, njata pula bajangan²nya dalam lapangan kebudayaan. Dalam taraf perdjjuangan anti imperialisme modern sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa kita sedjak permulaan abad ini dalam arti tertentu belumlah ada persoalan kesadaran kelas, meskipun tidak diragukan, bahwa sebagian ketjil dari bangsa kita berusaha menentang kekuatan nasional kita. Tetapi bukan mereka itu yang pokok, sebab mereka hanyalah pelajan² kaum imperialis, yang pokok adalah kaum imperialis itu. Oleh karena itu persoalan kesadaran kelas sebenarnya terlalu di-tjari², meskipun kita harus mengetahui dengan betul² bahwa setiap penggunaan kemenangan yang salah akan menimbulkan imperialisme baru, yaitu imperialisme oleh sebagian ketjil dari bangsa kita yang melupakan prinsip² dari perdjjuangan kita yang berdasarkan kesadaran nasional itu. Djika ini terdjadi, maka lahirlah burdjuasi alias imperialisme nasional dan inilah yang akan membuat sedjarah kita mengikuti djedjak sedjarah kaum imperialis itu sendiri, yaitu timbulnya kelas yang tidak lagi bersifat nasional, melainkan

sosial. Disinilah baru muntjul persoalan tentang kesadaran kelas. Namun persoalan ini dinegeri kita belum ada dan tidak perlu ada, asal sadja kita tidak mengchianati diri kita, jaitu tidak menentang kesadaran nasional kita sendiri, suatu kesadaran jang telah mentjakup bidang² sosial dan kebudayaan. Djika kita boleh mengatakan dengan singkat, kebudayaan nasional berlangsung dalam proses revolusionair kita menentang imperialisme modern itu, menentang kapitalisme asing dan perlu ditjatat, bahwa kita belum memiliki kapitalisme nasional, tanda²njapun, bahwa kita akan memiliki kapitalisme nasional itu, tidak ada, karena UUD kita setjara implisit menutup kemungkinan akan berkembangnja ekonomi liberal. Oleh karena itu dalam kondisi politik jang sedemikian kita hanya mempunjai satu konsep kebudayaan, jaitu konsep nasional. Ini toh tidak akan dimengerti oleh siapa jang tidak mengerti kepada kesadaran nasional kita. Memang sukarlah dibayangkan bagi siapa jang belum pernah ikut mengambil bagian dalam perdjjuangan nasional kita, in concrete dalam revolusi nasional kita, untuk mengerti akan perkembangan masyarakat kita sekarang. Djika kita memang tidak pernah turut dalam revolusi nasional ini, maka untuk mengerti makna kebudayaan nasionalpun adalah suatu kesukaran pula. Djika kita berdiri diluar revolusi nasional, baik sebagai penentang, pangedjek, maupun penonton, maka suatu konsep nasional tentang kebudayaan adalah suatu hal jang ridicule. Tetapi perlu disini diperingatkan, bahwa pun bagi siapa jang turut bergolak dalam revolusi nasional tidak berdasarkan kesadaran nasional, melainkan oleh perasaan takut ataupun ikut²an sadja, iapun tidak akan mengerti kepada nilai kebudayaan nasional. Ia akan mentjari pegangan lain, jang setjara psikologik telah mendesaknja keluar garis revolusi nasional, dan sekalipun dapat diutjapkanja berulang kali perkataan kesadaran nasional itu perkataan tersebut tidaklah mengandung hikmah sama sekali.

KEBUDAJAAN DILUAR KEBUDAJAAN?

Meskipun demikian, bagi siapa jang kesadarannya mempunjai kearahnan nasional sebagai kita lukiskan tadi², haruslah mengerti, bahwa kesadaran nasional sebagai kesadaran kebudayaan mengandung masalah² jang harus dibahas dengan sungguh². Apakah kebudayaan nasional itu mengandung implikasi, bahwa kita harus kembali kepada djaman² kebudayaan bangsa kita dahulu? Dengan sangat ber-hati² kita mentjoba memberikan djawaban, bahwa kesadaran nasional kita sebagaimana dirumuskan pada 20 Mei 1908 itu adalah suatu antitesis terhadap pendjadjahan sebagai proses sedjarah jang bersifat madju bagai arus gelombang jang tidak mengulangi dirinja. Oleh sifatnja jang madju itulah maka kebudayaan nasional tidak terkuntji dalam sel jang sempit dan gelap, melainkan bergolak tak terbatas bagaikan ombak dan gelombang samudera. Akan tetapi haruslah ditegaskan, bahwa kebudayaan nasional kita itu walaupun merupakan proses sedjarah bangsa kita, namun in sensu stricte tidaklah sama dengan proses sedjarah kita itu, kebudayaan nasional kita itu bukanlah ekspresi revolusi bangsa kita, melainkan ekspresi dari ekspresi revolusi bangsa kita sedjak kesadaran nasional itu kita miliki. Oleh karena dasarnya adalah kesadaran nasional itu kita tidak mengurung diri kita diantara tembok² perbatasan jang fiktif itu, melainkan sebagaimana kesadaran itu mempunjai kearahnan kebudayaan nasional kita itupun memiliki nilai² universal, mengingat, bahwa kebudayaan nasional kita itu tidak hanya melangsungkan dirinja dalam sedjarah bangsa kita se-mata², melainkan djuga dalam sedjarah dunia. Bukankah tjita² kemerdekaan kita jang kini masih kita realisasikan itu mempunjai hubungan erat dengan revolusi² diluar tanah-air kita sebagai revolusi Perantjis, revolusi Amerika, revolusi Rusia, revolusi Tiongkok, dsb? Teranglah, bahwa kebudayaan nasional kita itu tidak bertentangan dengan sedjarah dan djustru merupakan momen² penting

dari sedjarah jang bersifat maju itu. Djika kita telah menjelami hakikat kemadjuan sedjarah jang mendukung kebudajaan nasional kita sebagai momen²nja, maka pastilah kita dengan sendirinja akan meninggalkan pendirian kesadaran jang mentjoba membangun kebudajaan diluar sedjarah, dengan perkataan, mentjoba membangun kebudajaan diluar kebudajaan itu sendiri.

ACHIRJA : KEBUDAJAAN SEBAGAI PERKEMBANGAN

Kemadjuan sedjarah jang tidak mungkin dirintangi itu adalah evolusi dari sedjarah penguasaan alam. Oleh karena penguasaan alam itu merupakan realisasi manusia sebagai totalitas, dengan mana setiap keasingan diperanginja, maka arah kebudajaan itu menudju kepada nilai³ universal. Akan tetapi ini tidak berarti, bahwa nilai² universal itu harus meniadakan nasionalisme, karena sebagaimana kita mengetahui dalam pengertian² nasionalisme berbagai bangsa dapat bertemu sebagai jang kita saksikan di Bandung ditahun 1955, meskipun pertemuan jang lebih wadjar dipastikan oleh djalannja sedjarah. Nilai² universal itu tampaknya memang tidak dapat diarahi djika kita mengingat, bahwa penguasaan² alam itu berbeda tjara²nja, sistem²nja. Akan tetapi pada hakikatnja antara tjara² jang ber-beda² itu terbentanglah suatu tali hubungan kemanusiaan jang berpusatkan pada suatu penguasaan alam diharidepan, dimana dunia ini akan merupakan realisasi-bersama terhadap nilai² kemanusiaan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh A. de Waelhens mungkin akan lebih daripada suatu utopia ⁹⁾, akan tetapi kesanalah memang sedjarah itu menudjunja. Penguasaan alam itu, dan dalam hal ini kebudajaan adalah penguasaan alam jang autentik, memang dalam pelaksanaannja berlangsung dengan ber-beda², akan tetapi nilai² jang diarahinja sama. Apakah itu bisa tertjapai, memang tidak mungkin, karena djika mungkin, hal itu akan bertentangan dengan sifat² sedjarah jang tidak ber-henti²nja itu. Namun, djika kebudajaan sebagai ekspresi hidup manusia jang berakarkan pada perburuhan dan bahasa itu tidak mungkin mentjapai tudjuan universal itu, bagaikan Sisypheus jang tidak mungkin naik membebaskan diri dari djurang, tetapi agak lebih maju mentjapai tudjuan itu pada kebudajaan dalam arti jang sekundair, jaitu tidak sebagai ekspresi hidup manusia, melainkan ekspresi hidup manusia, meskipun berbeda dalam tjara dan melahirkannja. Berbeda dengan kebudajaan dalam pengertian primair, maka kebudajaan dalam pengertian sekundair tidak ditjptakan setjara produktif, tidak dapat difabrikasikan, melainkan ditjptakan setjara poetik, setjara artistik, jang autentik, artinja djika kebudajaan itu diklisekan, maka klisenja bukanlah lagi kebudajaan dalam arti sekundair, melainkan kebudajaan dalam arti primair. Dengan pengertian jang sekundair ini djustru oleh tjoraknja jang tidak pragmatik itu lebih mungkin nilai² universal itu direalisasikan, karena jang ditjarinja, baik oleh seni, ilmu, maupun agama, ialah kemanusiaan itu, ialah hakikat si manusia, tetapi tidak oleh seni jang pragmatik, tidak oleh ilmu jang pragmatik, tidak oleh agama jang pragmatik.

Demikianlah kebudajaan itu dengan bahasa jang lebih tepat dari rumus² logistika memangku fungsinja dalam realisasi-bersama terhadap nilai². Oleh karena itu tanpa protensi politik sedikitpun kebudajaan itu memilih tenpatnja jang paling tepat, jaitu manusia sebagai totalitas, kemanusiaan dan kerakjatan jang semesta.

⁹⁾ A. de Waelhens, *De Mens en de Cultuur*, sebuah referat jang diutjapkan di Brussel dalam bulan April 1958, dan telah diterbitkan dengan djudul "De Mens" ber-sama² referat² Strasser, Dondeyne, dll. oleh Penerbit Spectrum di Utrecht dan Antwerpen dalam tahun itu djuga. Lih. selandjutnja p. 68.